



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VIII DPR RI

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 4
Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat/ ke - 3
Dengan	: <b>Kepala Badan Pelaksana BPKH</b>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Selasa, 5 MARET 2019</b>
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: <b>Dr. H.Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: “Kebijakan penggunaan nilai manfaat dana haji pada virtual account”
Hadir	: ..... orang dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI. Kepala Badan Pelaksana BPKH

#### **I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.57 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas “Kebijakan penggunaan nilai manfaat dana haji pada virtual account”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan BPKH mengenai perubahan realokasi *virtual account* Tahun 2019 dari Rp.1,7 Triliun menjadi sebesar Rp. 1,2 Triliun atau maksimal 17% dari nilai manfaat tahun berjalan, karena dana yang Rp500 Miliar digunakan untuk membiayai *indirect cost* dalam BPIH 1440M/2019M.
2. Komisi VIII DPR RI meminta kepada BPKH untuk melaksanakan keputusan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama tanggal 4 Februari 2019 mengenai BPIH Tahun 1440H/2019M setelah dikeluarkan Keputusan Presiden mengenai *direct cost* dan *indirect cost* BPIH Tahun 1440H/2019M dan surat pertanggungjawaban mutlak keuangan dan hukum dari Kementerian Agama.
3. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan terhadap perubahan RKAT BPKH tahun 2019 yang akan ditentukan kemudian.

## III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.08 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**

ttd

**Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.**